
Perancangan Pembangunan Desa Berbasis E-Planning dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia Studi Kasus Desa Muara Jaya

Ardieansyah¹, Nadine Melya Putri Nugraha²

¹ Institute of Home Affairs Governance, arina_romarina@ipdn.ac.id, Agam, Sumatera Barat, Indonesia

² Institute of Home Affairs Governance, ardieansyah@praja.ac.id, Agam, Sumatera Barat, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of e-Planning in the development planning process of Muara Jaya Village and examine its relevance to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). The research focuses on how the 2025 e-Planning Coordination Meeting (Rakor) plays a role in increasing the capacity of village officials, strengthening data consistency, and supporting the development of a more measurable and digital-based Village Government Work Plan (RKPDDes). This study employed a qualitative descriptive method through a documentary study of activity reports, village planning documents, and literature related to village governance and the SDGs. The analysis was conducted interpretively to understand the process, challenges, and implications of e-Planning implementation at the village level. The results indicate that e-Planning implementation provides several important benefits, including increased transparency, efficient document preparation, strengthened data-driven planning, and facilitated development monitoring and evaluation. The e-Planning Coordination Meeting has been shown to improve officials' skills in operating the application, understanding planning indicators, and aligning village documents with district policies. Furthermore, integrating the Village Development Plan (RKPDDes) with the SDGs enables villages to design more inclusive, targeted, and sustainable development programs. The implementation of e-Planning also strengthens accountable governance and adapts to technological developments. This research confirms that digital planning is a crucial foundation for realizing modern, effective villages that can contribute significantly to achieving the SDGs.

Article Info :

Article history :

Received :

Revised :

Accepted :

Keywords:

e-Planning, Village Development, SDGs

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi pembangunan nasional. Desa sebagai satuan pemerintahan terdepan berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga proses perencanaan pembangunan desa harus dilakukan secara matang, terukur, dan berdasarkan data yang akurat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa, termasuk melalui penerapan sistem E-Planning sebagai inovasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Digitalisasi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan, efisien, serta mampu mendukung integrasi perencanaan dari desa hingga kabupaten (Handini dkk., 2025).

Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, menjadi salah satu desa yang berkomitmen mengikuti perkembangan tersebut. Keikutsertaannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) E-Planning Tahun 2025 yang diselenggarakan DP3APPKBPM Balangan menunjukkan upaya desa dalam meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat pemahaman mengenai tata kelola perencanaan berbasis digital. Melalui rakor ini, aparatur desa mendapatkan pendampingan teknis mengenai penginputan dokumen RKPDes 2026, pemahaman tentang konsistensi data, serta pentingnya sinkronisasi antara perencanaan desa dan kebijakan pembangunan kabupaten.

Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, penerapan E-Planning juga memiliki relevansi penting terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dengan adanya 17 tujuan dan 169 target, SDGs menjadi kerangka global yang dapat digunakan desa untuk menyusun program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Integrasi RKPDes dengan SDGs membantu memastikan bahwa setiap program desa tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi sosial, ekonomi, dan lingkungan (Administrator, 2025).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai pelaksanaan Rakor E-Planning, peningkatan kapasitas aparatur desa, integrasi SDGs dalam perencanaan, serta implikasinya terhadap tata kelola pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peran strategis E-Planning dalam mewujudkan pembangunan desa yang modern, efektif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam penerapan E-Planning dalam perencanaan pembangunan Desa Muara Jaya serta relevansinya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berita kegiatan Rakor E-Planning Tahun 2025, dokumen perencanaan desa, serta literatur terkait SDGs dan tata kelola desa. Analisis dilakukan secara interpretatif untuk mengaitkan temuan dengan konsep perencanaan digital, peningkatan kapasitas aparatur, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif atas proses dan implikasi penerapan E-Planning di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. E-Planning sebagai Instrumen Perancangan Pembangunan Desa yang Terintegrasi

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pada tingkat pemerintahan desa. Salah satu inovasi penting dalam proses perencanaan pembangunan desa adalah penerapan sistem E-Planning, sebuah aplikasi yang dirancang untuk menyusun, mengontrol, dan mengevaluasi dokumen perencanaan secara digital. Sistem ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola desa yang lebih transparan, efisien, dan terintegrasi. Di berbagai daerah termasuk Kabupaten Balangan, E-Planning digunakan sebagai alat untuk menyelaraskan perencanaan dari tingkat desa hingga kabupaten, sebagaimana terlihat dalam kegiatan Rakor Aplikasi E-Planning yang diikuti Desa Muara Jaya pada tahun 2025. Secara konsep, E-Planning merupakan sistem berbasis digital yang memungkinkan pemerintah desa melakukan penginputan, penyusunan, dan pelacakan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dengan digitalisasi, seluruh tahapan perencanaan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalkan human error dan kendala administratif yang sering terjadi dalam sistem manual. Penerapan E-Planning tidak hanya mempermudah proses birokrasi, namun juga meningkatkan akurasi data karena semua informasi tersimpan dalam satu basis data yang dapat dipantau secara berkelanjutan (Aprianto & Meliana, 2024).

Salah satu kelebihan utama dari E-Planning adalah integrasi data perencanaan, baik secara horizontal antar-unit pemerintahan desa, maupun secara vertikal dari desa ke kecamatan dan kabupaten. Integrasi ini penting karena perencanaan pembangunan tidak dapat berdiri sendiri; setiap usulan program desa harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Melalui E-Planning, pemerintah desa dapat memastikan bahwa dokumen perencanaannya sinkron dengan dokumen yang berada di tingkat kabupaten, sehingga mempermudah harmonisasi kebijakan, terutama dalam penggunaan anggaran dan prioritas program pembangunan.

Integrasi ini juga memperkuat prinsip perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif dan akuntabel. Sistem E-Planning umumnya menyediakan fitur pelacakan status usulan program, sehingga masyarakat dapat mengetahui program yang diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan bagaimana tindak lanjutnya. Informasi yang transparan seperti ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sekaligus menjadi bentuk nyata pelaksanaan prinsip *good governance*. Di sisi lain, aparatur desa lebih mudah mempertanggungjawabkan setiap keputusan karena seluruh proses terekam dalam sistem digital.

Selanjutnya, penggunaan E-Planning mendorong penerapan standar perencanaan yang lebih konsisten dan terukur. Dalam sistem tersebut, setiap program yang diinput perlu disertai indikator kinerja, sasaran, lokasi, serta anggaran yang jelas. Hal ini memaksa penyusun perencanaan untuk lebih teliti dan terstruktur dalam menyusun program. Tidak ada ruang bagi penyusunan program yang tidak memiliki dasar

kebutuhan atau tidak selaras dengan data riil desa. Konsistensi data menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan pembangunan, terutama ketika pemerintah kabupaten melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen RKPDes yang telah disusun.

Pada konteks Desa Muara Jaya, kegiatan Rakor E-Planning tahun 2025 memberikan gambaran konkret bagaimana aplikasi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan desa. Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari DP3APPKBPM Balangan memberikan pendampingan teknis mengenai cara input dokumen RKPDes 2026 secara tepat dalam aplikasi E-Planning. Pendampingan ini penting mengingat banyak aparatur desa yang masih berada dalam tahap adaptasi terhadap sistem digital. Melalui pelatihan dan bimbingan teknis, pemerintah desa diberikan pemahaman mengenai pentingnya konsistensi data, kesesuaian indikator, serta mekanisme pemantauan program melalui sistem (Loka dkk., 2022).

E-Planning juga berperan strategis dalam mendukung penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat desa. SDGs menuntut perencanaan pembangunan yang terukur, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui E-Planning, desa memiliki alat untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dirancang dapat dikaitkan dengan target SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan infrastruktur, dan pembangunan institusi yang transparan. Dengan demikian, E-Planning bukan hanya alat administratif, melainkan instrumen untuk menerjemahkan tujuan pembangunan global ke dalam konteks lokal desa.

Lebih jauh, digitalisasi perencanaan melalui E-Planning meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi (Monev). Pemerintah desa dapat melacak progres pelaksanaan program secara real time, melihat capaian kinerja, dan mengidentifikasi hambatan yang terjadi. Fitur Monev ini sangat penting untuk memastikan bahwa program tidak hanya direncanakan dengan baik, tetapi juga dilaksanakan secara efektif dan sesuai jadwal. Pemerintah kabupaten dan kecamatan pun dapat melakukan supervisi dengan lebih mudah karena data yang tampak di sistem selalu diperbarui.

Meskipun demikian, penerapan E-Planning tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Keterbatasan kemampuan digital aparatur desa, jaringan internet yang tidak stabil, serta kurangnya perangkat pendukung adalah masalah umum yang dihadapi desa-desa di Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan seperti Rakor dan pendampingan teknis menjadi sangat penting dalam memperkuat kapasitas SDM desa. Dengan dukungan pelatihan berkelanjutan, desa dapat memanfaatkan E-Planning secara maksimal sebagai instrumen utama dalam perancangan pembangunan.

Secara keseluruhan, E-Planning telah menjadi elemen krusial dalam menciptakan perencanaan pembangunan desa yang terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi keberlanjutan. Melalui sistem ini, desa dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas, selaras dengan kebijakan daerah, dan mendukung pencapaian SDGs. Dengan demikian, E-Planning tidak hanya menjadi alat teknologi, tetapi juga merupakan fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Mashudi & Paselle, 2024).

b. Pelaksanaan Rakor E-Planning Tahun 2025 oleh DP3APPKBPM Balangan

Rapat Koordinasi (Rakor) E-Planning Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APPKBPM) Kabupaten Balangan merupakan salah satu agenda penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan desa. Rakor ini menjadi ruang strategis untuk melakukan monitoring, evaluasi, serta penguatan kapasitas aparatur desa dalam menerapkan aplikasi E-Planning sebagai sistem perencanaan yang modern dan berbasis digital. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis, 6 November 2025, bertempat di Aula Dharma Setya Kantor DP3APPKBPM Balangan, mempertemukan perwakilan desa dari seluruh kecamatan, termasuk Desa Muara Jaya dari Kecamatan Awayan.

Pelaksanaan Rakor E-Planning ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan untuk memastikan bahwa seluruh desa memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa secara digital. Sistem E-Planning menjadi instrumen penting dalam menciptakan transparansi pembangunan, serta memastikan keselarasan antara perencanaan desa, kecamatan, hingga kabupaten. Oleh karena itu, Rakor ini tidak hanya dimaksudkan sebagai kegiatan rutin, tetapi lebih sebagai proses berkelanjutan untuk membangun ekosistem perencanaan yang solid dan terintegrasi.

Kegiatan Rakor dimulai pada pukul 13.00 WITA dan berlangsung hingga pukul 16.30 WITA. Selama kegiatan, peserta mendapatkan berbagai materi yang bersifat aplikatif dan teknis terkait penggunaan sistem E-Planning. Para narasumber dari DP3APPKBPM memberikan bimbingan langsung mengenai mekanisme penginputan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2026 ke dalam aplikasi. Penyampaian materi disertai dengan simulasi dan pendampingan teknis, sehingga aparatur desa dapat memahami sekaligus mempraktikkan langkah-langkah pengisian data secara benar dan sesuai standar. Salah satu aspek penting yang ditekankan dalam Rakor adalah pentingnya konsistensi data dalam dokumen perencanaan. Narasumber menegaskan bahwa kualitas perencanaan desa sangat dipengaruhi oleh keakuratan data yang diinput. Data perencanaan yang tidak konsisten atau tidak sinkron dengan dokumen lain seperti RPJMDes atau data profil desa dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan riil desa dan program pembangunan yang direncanakan. Dalam konteks integrasi perencanaan, konsistensi data ini menjadi krusial agar sinkronisasi antara desa dan kabupaten dapat berjalan optimal.

Tidak hanya berhenti pada aspek teknis, Rakor E-Planning Tahun 2025 juga memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya transformasi digital dalam tata kelola desa. Para peserta dijelaskan mengenai bagaimana E-Planning dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perencanaan, serta bagaimana sistem ini mempermudah proses monitoring dan evaluasi (Monev) program pembangunan. Dengan digitalisasi, setiap tahapan mulai dari pengusulan program, verifikasi, penetapan RKPDDes, hingga pelaksanaan program dapat dipantau secara real-time dan terdokumentasi dengan baik.

Kehadiran Desa Muara Jaya dalam Rakor ini menunjukkan komitmen desa tersebut untuk ikut serta dalam proses pembangunan yang lebih modern. Aparatur desa mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dan pendampingan teknis, yang menjadi bekal

dalam penyusunan RKPDes 2026 berbasis digital. Partisipasi ini penting, mengingat desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah, sehingga kemampuan aparatur desa dalam memahami teknologi perencanaan digital harus terus ditingkatkan.

Pelaksanaan Rakor E-Planning juga memiliki dimensi strategis dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) tingkat desa. SDGs menuntut proses pembangunan yang inklusif, berbasis data, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui E-Planning, desa dapat menghubungkan setiap program pembangunan dengan target SDGs. Narasumber memberikan contoh bagaimana program desa dapat dikaitkan dengan tujuan SDGs seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), kesehatan (SDG 3), pendidikan (SDG 4), infrastruktur (SDG 9), dan tata kelola yang transparan (SDG 16). Pendekatan berbasis indikator ini memperkuat kualitas perencanaan dan memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap tujuan pembangunan global.

Selain itu, Rakor juga menjadi forum evaluasi bagi DP3APPKBPMMD untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi desa dalam penerapan E-Planning. Beberapa desa mungkin menghadapi kendala seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital aparatur desa, ataupun kurangnya perangkat teknologi. Melalui Rakor, masalah-masalah tersebut dapat dipetakan sehingga pemerintah kabupaten dapat merumuskan strategi pendampingan lanjutan. Forum ini juga memberikan ruang bagi desa untuk saling bertukar pengalaman dan solusi, sehingga terbentuk jejaring pembelajaran antar desa.

Kegiatan Rakor E-Planning Tahun 2025 kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat implementasi E-Planning secara merata di seluruh desa di Kabupaten Balangan. Pemerintah Desa Muara Jaya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola sistem perencanaan digital. Komitmen tersebut sangat penting, mengingat E-Planning bukan hanya alat teknologi, tetapi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, adaptif, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Rakor E-Planning Tahun 2025 oleh DP3APPKBPMMD Balangan merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem perencanaan pembangunan desa. Melalui kegiatan ini, aparatur desa mendapatkan pemahaman teknis dan konseptual mengenai pentingnya digitalisasi perencanaan, serta bagaimana E-Planning dapat diintegrasikan dalam penyusunan RKPDes yang lebih berkualitas. Rakor ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah berperan aktif dalam mengakselerasi modernisasi desa, sekaligus memastikan bahwa pembangunan desa sejalan dengan prinsip transparansi, integrasi data, dan keberlanjutan (Maggara & Frinaldi, 2021).

c. Kesiapan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Muara Jaya dalam Perencanaan Digital

Kesiapan aparatur desa dalam menghadapi era digital menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan modernisasi tata kelola pemerintahan. Dalam konteks perencanaan pembangunan berbasis aplikasi E-Planning, Desa Muara Jaya menunjukkan

langkah-langkah signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan perencanaan digital. Keikutsertaan mereka dalam Rakor E-Planning Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk mengukur kemampuan, tantangan, dan strategi yang ditempuh desa dalam memperkuat kapasitas aparatur. Pembahasan berikut menguraikan kesiapan tersebut dalam beberapa aspek utama (Maggara & Frinaldi, 2021).

1. Kesadaran Aparatur Desa terhadap Pentingnya Digitalisasi Perencanaan

Langkah awal dalam meningkatkan kapasitas aparatur adalah pemahaman mereka terhadap urgensi digitalisasi. Aparatur Desa Muara Jaya menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat bahwa proses perencanaan pembangunan tidak lagi dapat dilakukan secara manual. Perubahan paradigma ini muncul seiring pemahaman bahwa digitalisasi tidak hanya sekadar mengikuti tren, tetapi juga menjadi kebutuhan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Kesadaran tersebut tumbuh melalui penyuluhan dan paparan materi dalam Rakor E-Planning yang memberikan gambaran komprehensif tentang manfaat penggunaan aplikasi. Aparatur mulai memahami bahwa E-Planning dapat meminimalkan kesalahan administrasi, mempercepat proses verifikasi, serta mempermudah koordinasi antara desa, kecamatan, dan kabupaten. Kesadaran inilah yang menjadi pondasi utama bagi aparatur untuk terbuka menerima teknologi dan berkomitmen untuk mempelajarinya lebih dalam.

2. Penguatan Kompetensi Teknis melalui Pelatihan dan Pendampingan

Aspek paling langsung terlihat dalam kesiapan aparatur Desa Muara Jaya adalah peningkatan keterampilan teknis mereka. Melalui Rakor E-Planning, aparatur mendapat pendampingan langsung dari DP3APPKBPM Balangan. Pendampingan ini meliputi pengenalan fitur aplikasi, cara menginput dokumen RKPDes 2026, menentukan indikator capaian, hingga memahami mekanisme sinkronisasi data antar dokumen perencanaan.

Melalui simulasi pengisian data, aparatur desa belajar menerapkan langkah teknis yang benar. Kegiatan ini sangat membantu, terutama bagi aparatur yang belum terbiasa dengan aplikasi berbasis web. Meskipun masih terdapat keterbatasan dalam hal kemampuan digital, semangat belajar aparatur terlihat jelas dari keaktifan mereka bertanya, mencoba, dan mempraktikkan langsung cara kerja aplikasi.

Pendampingan ini juga membuka peluang bagi aparatur untuk mengembangkan kemampuan digital mereka secara lebih mandiri. Pemahaman teknis yang diperoleh menjadi bekal penting untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan desa ke depan.

3. Peningkatan Manajemen Data dan Konsistensi Informasi

Kemampuan aparatur desa tidak hanya diukur dari bagaimana mereka mengoperasikan aplikasi, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu mengelola data perencanaan secara baik dan konsisten. Melalui Rakor, aparatur Desa Muara Jaya diingatkan bahwa kualitas perencanaan sangat ditentukan oleh validitas dan konsistensi data. Ketidaktepatan atau ketidaksesuaian data dapat menghambat proses evaluasi dan persetujuan dokumen perencanaan di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

Sebagai respons, aparaturnya mulai memahami pentingnya memperbaharui data desa secara berkala, termasuk data penduduk, data aset desa, data sosial ekonomi, serta data penunjang lainnya. Kesadaran ini memperkuat kemampuan aparaturnya dalam menata arsip digital, memverifikasi data, dan memastikan kesesuaian dokumen perencanaan seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

Dengan manajemen data yang lebih baik, aparaturnya dapat menyusun perencanaan yang lebih akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kesiapan Infrastruktur Pendukung di Pemerintah Desa

Kapasitas aparaturnya tidak dapat meningkat tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Desa Muara Jaya mulai melakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki infrastruktur digital sebagai bagian dari kesiapan mereka menghadapi sistem E-Planning. Beberapa perangkat seperti komputer, printer, jaringan internet, dan penyimpanan berbasis cloud menjadi perhatian utama desa.

Meskipun belum sepenuhnya ideal, desa menunjukkan keseriusannya dengan memprioritaskan perbaikan fasilitas digital secara bertahap. Pemerintah desa juga mempertimbangkan pengadaan perangkat tambahan serta peningkatan kualitas jaringan internet untuk mendukung kelancaran proses input data. Kesadaran akan pentingnya infrastruktur ini menjadi bukti bahwa kesiapan aparaturnya tidak hanya bergantung pada pelatihan, tetapi juga pada dukungan teknis yang memungkinkan mereka bekerja lebih optimal.

5. Komitmen Berkelanjutan terhadap Peningkatan Kapasitas Aparaturnya

Kesiapan aparaturnya Desa Muara Jaya dalam perencanaan digital tidak bersifat temporer, tetapi merupakan bagian dari komitmen jangka panjang. Aparaturnya menyadari bahwa penggunaan aplikasi E-Planning menuntut mereka untuk selalu belajar dan beradaptasi. Oleh karena itu, pemerintah desa menyatakan komitmennya untuk mengikuti pelatihan lanjutan, baik yang diselenggarakan DP3APPKBPM maupun lembaga lain yang relevan.

Komitmen ini juga terlihat dari kesediaan desa untuk membangun budaya kerja baru yang lebih tertib dalam pengelolaan dokumen. Aparaturnya juga mulai saling berbagi tugas dan pengetahuan agar penggunaan aplikasi dapat dilakukan secara bersama-sama, tidak tergantung pada satu atau dua orang saja. Langkah ini memperkuat kapasitas kelembagaan desa sekaligus membangun kemandirian dalam pengelolaan sistem digital.

6. Keterkaitan Kapasitas Aparaturnya dengan Pencapaian SDGs Desa

Peningkatan kapasitas aparaturnya dalam perencanaan digital juga berperan langsung dalam upaya Desa Muara Jaya menjalankan program pembangunan berkelanjutan. SDGs menuntut tata kelola yang transparan, inklusif, dan berbasis data. Dengan kemampuan aparaturnya yang semakin meningkat, desa lebih mampu mengarahkan program ke tujuan SDGs seperti pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, inovasi, dan tata kelola yang baik (SDG 16).

Kemampuan aparatur dalam membaca indikator, mengelola data, dan menyusun program berbasis kebutuhan menjadi kunci agar desa dapat berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian target-target SDGs.

Secara keseluruhan, Desa Muara Jaya telah menunjukkan kesiapan yang cukup baik dalam memasuki era perencanaan digital. Melalui peningkatan kapasitas aparatur, perbaikan manajemen data, dukungan infrastruktur, dan komitmen jangka panjang, desa berada pada jalur yang tepat untuk menghadirkan tata kelola pembangunan yang modern, efektif, dan berkelanjutan melalui E-Planning.

d. Integrasi Perancangan RKPDes dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Integrasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. SDGs yang memiliki 17 tujuan dan 169 target memberikan kerangka global yang dapat diadaptasi oleh pemerintah desa dalam merumuskan prioritas pembangunan. Dalam konteks Desa Muara Jaya, upaya mengintegrasikan RKPDes dengan SDGs menjadi semakin relevan setelah diterapkannya perencanaan digital melalui aplikasi E-Planning. Dengan sistem ini, penyusunan RKPDes dapat dilakukan secara lebih terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Ubaidillah & Salahudin, 2024).

1. Pentingnya Integrasi SDGs dalam Perencanaan Desa

Integrasi SDGs ke dalam RKPDes sangat penting karena pembangunan yang hanya berorientasi pada output jangka pendek berpotensi mengabaikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. SDGs memberikan pendekatan yang lebih komprehensif, menekankan pemerataan, keberlanjutan, serta prinsip *no one left behind*. Dalam kerangka ini, pembangunan harus menjangkau semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan. Bagi Desa Muara Jaya, integrasi SDGs bukan hanya mengikuti arahan nasional, tetapi juga memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar membawa dampak positif yang luas dan berkelanjutan. Perencanaan desa yang tidak terintegrasi dengan SDGs seringkali tidak menargetkan isu strategis seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, serta kualitas lingkungan.

2. Pemanfaatan Data dalam Integrasi RKPDes dan SDGs

Aplikasi E-Planning memberikan peluang besar untuk mengintegrasikan data SDGs Desa dengan perencanaan tahunan. Salah satu kelemahan perencanaan konvensional ialah minimnya data terbaru, sehingga program pembangunan tidak tepat sasaran. Melalui E-Planning, pemerintah desa dapat menginput data profil desa yang memuat indikator-indikator SDGs Desa, seperti angka kemiskinan, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, sanitasi, hingga data lingkungan.

Dengan data tersebut, aparatur desa dapat menganalisis kondisi nyata masyarakat dan mengarahkan program RKPDes agar sesuai dengan target SDGs. Misalnya, jika data menunjukkan tingginya angka rumah tidak layak huni, maka program

peningkatan kualitas perumahan dapat dikaitkan dengan SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan). Dengan demikian, perencanaan menjadi lebih relevan, berbasis bukti, dan terukur.

3. Integrasi Program Prioritas RKPDes dengan Tujuan-Tujuan SDGs

Setiap program dalam RKPDes dapat dikaitkan langsung dengan beberapa tujuan SDGs. Berikut beberapa contoh integrasi yang relevan bagi Desa Muara Jaya:

1) SDG 1: Tanpa Kemiskinan

Program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan usaha kecil, peningkatan kapasitas petani, serta bantuan modal UMKM dapat diarahkan untuk mengurangi kemiskinan. Dalam RKPDes, program ini dapat diberi indikator yang jelas agar hasilnya dapat diukur melalui E-Planning.

2) SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan posyandu, peningkatan gizi balita, dan sosialisasi pola hidup sehat. Integrasi SDG 3 penting untuk mengurangi angka stunting atau penyakit menular di desa.

3) SDG 4: Pendidikan Berkualitas

Program peningkatan pendidikan dapat berupa pelatihan literasi digital, pengadaan buku belajar, atau pemberian beasiswa. Aparatur dapat mengarahkan kegiatan ini agar sesuai dengan indikator SDG 4 yang mendorong pendidikan inklusif dan berkualitas.

4) SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Digitalisasi desa melalui penggunaan E-Planning, pengadaan jaringan internet, serta pembangunan infrastruktur publik dapat mendukung SDG 9. Infrastruktur yang baik mempercepat pelayanan dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

5) SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan desa, terutama melalui sistem digital, merupakan bagian dari SDG 16. RKPDes yang terintegrasi dengan E-Planning dan dapat dipantau masyarakat merupakan wujud nyata penguatan kelembagaan desa.

Dengan mengaitkan setiap program RKPDes pada tujuan SDGs tertentu, desa dapat memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan memiliki relevansi dan memberikan dampak berkelanjutan.

4. Peran E-Planning dalam Sinkronisasi SDGs dan RKPDes

Aplikasi E-Planning menjadi alat penting dalam memastikan sinkronisasi RKPDes dan SDGs melalui beberapa cara:

- 1) Menyediakan platform input data yang terstandardisasi, sehingga memudahkan penyelarasan indikator program dengan indikator SDGs.
- 2) Mempercepat proses monitoring dan evaluasi, sehingga capaian program desa dapat dipantau secara real time.

- 3) Mendokumentasikan seluruh proses perencanaan secara transparan, sehingga mempermudah pelaporan SDGs Desa ke tingkat kecamatan dan kabupaten.
- 4) Menghubungkan dokumen RPJMDes dan RKPDes, sehingga setiap program yang masuk dalam rencana tahunan tetap konsisten dengan visi pembangunan jangka menengah desa.

Dengan fungsi-fungsi ini, integrasi perencanaan desa tidak lagi dilakukan secara manual atau terpisah-pisah, tetapi menjadi satu kesatuan yang saling mendukung.

5. Tantangan Integrasi SDGs dalam RKPDes

Meskipun integrasi SDGs merupakan langkah penting, beberapa tantangan tetap harus diperhatikan:

- 1) Keterbatasan kemampuan aparatur dalam memahami indikator SDGs secara mendalam.
- 2) Masih adanya data desa yang belum diperbarui secara rutin.
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran SDGs dalam pembangunan desa.
- 4) Keterbatasan anggaran desa untuk menangani seluruh isu SDGs secara bersamaan.

Namun, melalui peningkatan kapasitas aparatur dan pendampingan berkelanjutan, tantangan ini dapat diatasi secara bertahap.

6. Dampak Integrasi SDGs terhadap Kualitas Pembangunan Desa

Integrasi SDGs ke dalam RKPDes membawa banyak manfaat bagi Desa Muara Jaya, seperti:

- 1) Pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
- 2) Prinsip pemerataan dan keberlanjutan lebih terjamin.
- 3) Tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel.
- 4) Desa memiliki dasar kuat untuk melakukan inovasi yang berkelanjutan.
- 5) Capaian pembangunan dapat diukur secara objektif dan dilaporkan secara sistematis.

Dengan demikian, integrasi SDGs bukan hanya strategi administratif, tetapi suatu pendekatan holistik yang memperkuat identitas desa sebagai penyelenggara pembangunan yang inklusif dan berorientasi masa depan.

Secara keseluruhan, integrasi RKPDes dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan langkah penting bagi Desa Muara Jaya untuk memastikan pembangunan desa tidak hanya berjalan secara efektif dari tahun ke tahun, tetapi juga membawa dampak berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan dukungan teknologi digital seperti E-Planning dan peningkatan kapasitas aparatur,

proses integrasi ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Matabei & Rudianto, 2025).

e. Implikasi E-Planning terhadap Tata Kelola Pembangunan Desa Berkelanjutan

Penerapan E-Planning di tingkat desa memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa. Lebih dari sekadar alat digital, E-Planning menjadi instrumen transformasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif. Dalam konteks Desa Muara Jaya, pemanfaatan E-Planning tidak hanya membantu penyusunan RKPDes 2026 secara lebih terstruktur, tetapi juga membawa implikasi langsung dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan sesuai prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). Pembahasan berikut menguraikan implikasi tersebut dalam beberapa aspek utama (Maharani & Manar, 2020).

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Desa

Salah satu implikasi paling nyata dari penggunaan E-Planning adalah meningkatnya transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Sistem digital ini memungkinkan seluruh proses perencanaan, mulai dari penginputan program, verifikasi data, hingga penetapan RKPDes, terdokumentasi dengan baik dan dapat dipantau secara jelas. Dokumen yang sebelumnya harus dicari secara manual kini dapat diakses dalam satu platform, sehingga mengurangi potensi manipulasi data atau penyimpangan dalam proses perencanaan. Transparansi ini memperkuat akuntabilitas aparatur desa karena setiap langkah dan keputusan tercatat secara permanen dalam sistem.

Bagi masyarakat, peningkatan transparansi berarti mereka dapat lebih memahami arah pembangunan desa dan berpartisipasi dalam memberikan masukan atau pengawasan. Ini sejalan dengan prinsip SDG 16 yang menekankan pentingnya institusi yang transparan, inklusif, dan bertanggung jawab.

2. Efisiensi dalam Penyusunan dan Validasi Dokumen Perencanaan

E-Planning membantu desa mempercepat proses penyusunan RKPDes melalui fitur otomatisasi dan standarisasi data. Dengan sistem ini, aparatur Desa Muara Jaya tidak lagi harus mengulang format penyusunan dokumen setiap tahun, karena kerangka kerja telah tersedia dalam aplikasi. Selain itu, aplikasi memudahkan proses validasi dokumen oleh kecamatan dan kabupaten. Jika terjadi kesalahan data atau ketidaksesuaian antara RPJMDes dan RKPDes, sistem akan menolak atau memberikan tanda kesalahan. Hal ini memastikan dokumen yang disusun memiliki kualitas yang lebih baik, lebih konsisten, dan sesuai ketentuan.

Efisiensi ini berdampak langsung pada penghematan waktu dan sumber daya, sehingga aparatur desa dapat fokus pada program-program pembangunan lainnya. Implikasi ini mendukung SDG 9 terkait inovasi sistem pemerintahan dan infrastruktur berbasis teknologi.

3. Penguatan Pengambilan Keputusan Berbasis Data (Data-Driven Planning)

Salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan adalah perencanaan berbasis data yang akurat. Melalui E-Planning, aparaturnya Desa Muara Jaya dapat mengakses data desa secara lebih terorganisir, mulai dari data kependudukan, ekonomi, kesehatan, hingga lingkungan. Data ini menjadi landasan penting untuk menentukan prioritas program dalam RKPDes. Misalnya, jika data menunjukkan tingginya angka stunting, maka program kesehatan dan gizi menjadi prioritas utama yang dikaitkan dengan SDG 2 dan SDG 3. Jika data menunjukkan rendahnya tingkat literasi digital, maka pelatihan teknologi dapat digencarkan untuk mendukung SDG 4.

Pengambilan keputusan yang lebih objektif dan evidence-based ini membantu desa menghindari program yang sifatnya hanya seremonial atau tidak berdampak signifikan, sehingga setiap kegiatan benar-benar menyoal kebutuhan masyarakat.

4. Mempermudah Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Desa

E-Planning memiliki fitur yang memungkinkan pelacakan secara real-time terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Aparatur desa dapat memantau status program, progres fisik, serta penggunaan anggaran dengan lebih terukur. Bagi pemerintah kabupaten, fitur ini mempermudah mereka untuk melakukan supervisi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program. Dengan demikian, Monev tidak lagi dilakukan pada akhir tahun saja, tetapi dapat dilakukan secara berkala melalui sistem. Implikasi ini penting dalam pembangunan berkelanjutan karena program yang tidak berjalan sesuai rencana dapat segera diperbaiki sehingga tidak berdampak pada capaian indikator SDGs desa.

5. Penguatan Kolaborasi antara Desa, Kecamatan, dan Kabupaten

E-Planning menciptakan ruang koordinasi yang lebih efektif antara tingkat pemerintahan. Desa tidak lagi bekerja sendiri dalam menyusun perencanaan, tetapi harus memastikan keselarasan dengan dokumen kabupaten seperti RKPD. Koordinasi ini diperkuat melalui verifikasi sistematis oleh kecamatan dan kabupaten. Alur komunikasi yang lebih jelas membuat sinkronisasi program menjadi lebih mudah dan menghindari tumpang tindih anggaran atau prioritas.

Implikasi kolaboratif ini mendukung prinsip SDG 17 tentang kemitraan dalam pembangunan.

6. Mendorong Transformasi Digital dan Inovasi Tata Kelola Desa

Pemanfaatan E-Planning mendorong aparaturnya Desa Muara Jaya untuk beradaptasi dengan teknologi dan mengembangkan budaya kerja yang lebih berbasis digital. Transformasi ini tidak hanya terbatas pada penyusunan dokumen perencanaan, tetapi juga mendorong inovasi di bidang pelayanan administrasi, pengelolaan data, serta manajemen keuangan desa. Adaptasi teknologi ini penting dalam membangun desa yang lebih tangguh dan modern. Desa yang mampu memanfaatkan inovasi secara optimal akan lebih cepat berkembang dan mampu bersaing dalam pembangunan berkelanjutan.

7. Dampak terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

E-Planning memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap berbagai tujuan SDGs desa. Beberapa kontribusinya antara lain:

1) SDG 1 (Tanpa Kemiskinan)

Perencanaan yang lebih tepat sasaran mendukung program pengentasan kemiskinan.

2) SDG 3 (Kesehatan)

Data yang akurat membantu penentuan program kesehatan prioritas.

3) SDG 4 (Pendidikan)

Digitalisasi mendorong literasi teknologi warga desa.

4) SDG 9 (Infrastruktur & Inovasi)

Mendorong penggunaan teknologi dalam pemerintahan.

5) SDG 16 (Institusi yang Tangguh)

Transparansi dan akuntabilitas meningkat signifikan.

6) SDG 17 (Kemitraan)

Sinkronisasi antar tingkatan pemerintahan semakin kuat.

Dengan demikian, E-Planning menjadi instrumen penting yang mempercepat capaian SDGs di tingkat desa.

Secara keseluruhan, implikasi E-Planning terhadap tata kelola pembangunan Desa Muara Jaya sangat luas dan mendalam. Sistem ini tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan, tetapi juga memperkuat tata kelola yang transparan, inklusif, berbasis data, dan berkelanjutan. Dengan komitmen berkelanjutan dari aparatur desa dan dukungan pemerintah daerah, E-Planning akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan desa yang maju, modern, dan berdaya saing (Papatungon dkk., 2023).

KESIMPULAN

Penerapan E-Planning dalam perencanaan pembangunan desa memberikan perubahan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi. Berdasarkan pembahasan terkait kegiatan Rakor E-Planning Tahun 2025 yang diikuti Desa Muara Jaya, terlihat bahwa digitalisasi perencanaan bukan hanya menjadi tuntutan administrasi, tetapi juga kebutuhan strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Melalui pelatihan dan pendampingan oleh DP3APPKBPM Balangan, aparatur desa memperoleh peningkatan kapasitas, baik secara teknis maupun manajerial, sehingga mampu mengelola data dan menyusun dokumen RKPDes secara lebih terukur dan akurat. Integrasi RKPDes dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap program desa tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. E-Planning mempermudah sinkronisasi perencanaan antara desa-kecamatan-kabupaten, memperkuat monitoring dan evaluasi, serta meningkatkan akuntabilitas publik.

Secara keseluruhan, E-Planning terbukti memberikan fondasi kuat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan komitmen berkelanjutan dari aparatur Desa Muara Jaya dan dukungan

pemerintah daerah, digitalisasi perencanaan dapat terus dikembangkan untuk memperkuat kontribusi desa terhadap pencapaian SDGs dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2025, November 8). *Desa Muara Jaya Ikuti Rakor Aplikasi E-Planning Tahun 2025*. Website Resmi Desa Muara Jaya. <https://muarajaya.digitaldesa.id/berita/desa-muara-jaya-ikuti-rakor-aplikasi-e-planning-tahun-2025>
- Aprianto, N. E. K., & Meliana, R. (2024). Evaluation of the Bangga Mbangun Desa Policy in Improving Regional Development in Cilacap Regency, Central Java. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(2), 205–220. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.382>
- Handini, N., Darwina, M., Yudistira, & Pangestoeti, W. (2025). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(5), 964–986. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5793>
- Loka, D. M., Abdullah, A., & Sudirman, F. A. (2022). Identifikasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pemerintah Kota Kendari Pada Masa New Normal. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 222–235. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.51>
- Maggara, T. S., & Frinaldi, A. (2021). Dampak Budaya Kerja dalam Penerapan Aplikasi E-Planning untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(2), 135–143. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i2.196>
- Maharani, D. D., & Manar, D. G. (2020). Penerapan E-Planning sebagai bentuk Sistem Perencanaan Daerah Berbasis Teknologi di Kabupaten Demak. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(03), 41–50.
- Mashudi, E., & Paselle, E. (2024). Evaluasi Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi E-Musrenbang Berbasis Geospasial dalam Pembangunan di Kota Bontang. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(6), 2061–2077. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i6.1196>
- Matabei, P., & Rudianto, C. (2025). Perencanaan Strategis Sistem Informasi/Teknologi Informasi Pemerintah Kota Salatiga Menggunakan Metodologi Ward and Peppard. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 4(2), 503–512. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i2.638>
- Paputungan, A. P., Mandagi, M., Mantiri, J., & Haeranah, H. (2023). Efektivitas Penerapan System E-Planning di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(1), 11–21. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i1.3424>
- Ubaidillah, H., & Salahudin. (2024). Desain Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. *JPkM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 21–33. <https://doi.org/10.70214/qbdrh458>